

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENDIDIKAN KEWIRUSAHAAN MASYARAKAT (PKM)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
DI DESA BALONGGANDU KECAMATAN JATISARI
KABUPATEN KARAWANG**

Ratna Sari Dewi

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah,
FKIP - Universitas Singaperbangsa Karawang
email : nyixdarmi_indos@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis data : 1) proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM), dan 2) evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) di desa Balonggandu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) di Desa Balonggandu secara umum cukup matang dalam hal perencanaan dengan pemilihan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan kelompok masyarakat. Secara umum pelaksanaannya dapat menunjang keberhasilan kegiatan PNPM Mandiri melalui PKM dalam mengembangkan kewirausahaan terbukti dengan keseriusan UPK Jatisari Mandiri dalam merekrut tutor/instruktur/pelatih yang memiliki kompetensi dasar yang baik. (2) Evaluasi Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Balonggandu, merujuk pada hasil PNPM Mandiri melalui pendidikan keirausahaan masyarakat di Desa Balonggandu cukup berhasil dalam mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat.

Kata kunci : *Evaluasi Program, PNPM Mandiri, PKM , Pelatihan*

**EVALUATION PROGRAM OF COMMUNITY DEVELOPMENT THROUGH EDUCATION
COMMUNITY ENTREPRENEURSHIP (PKM) NATIONAL COMMUNITY DEVELOPMENT
PROGRAM (PNPM) IN BALONGGANDU JATISARI KARAWANG**

Ratna Sari Dewi

Nonformal Education Departemen
Faculty of Teachers Training and Education
University of Singaperbangsa Karawang
email: nyixdarmi_indos@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to reveal and analyze the data: 1) the process of community empowerment through entrepreneurship education community (PKM), and 2) evaluation of community empowerment through PKM in Balonggandu. This research was conducted using qualitative approach case study method. Data collection techniques used are (1) observation, (2) interviews, and (3) documentation. The results of this study indicate that: (1) Process for Community Empowerment through PKM in Balonggandu is generally quite mature in terms of planning with the selection of activities based on the priority needs of the community. In general, it supports the success of the National Program for Community Empowerment (PNPM) through PKM in developing entrepreneurship as evidenced by the seriousness of UPK Jatisari Mandiri in recruiting tutors/instructors/coaches who have good basic competence. (2) Evaluation of PKM activity PNPM Mandiri in Balonggandu showed good results in developing entrepreneurship and increasing the income of the business community.

Keywords: Evaluation Program, PNPM Mandiri, Entrepreneurship Education Community

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja tanpa diikuti pertumbuhan lapangan kerja, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan angkatan kerja, atau ketidaksesuaian antara pengetahuan serta keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan signifikan. Meskipun sumber daya alam cukup tersedia sebagai alternatif lain untuk diolah dan dijadikan lapangan kerja, akan tetapi pendayagunaan sumber daya alam tersebut belum optimal, sehubungan belum adanya tenaga kerja yang andal serta profesional dalam pengolahan sumber daya alam tersebut.

Kondisi tersebut di atas telah menjadi salah satu faktor penyebab munculnya berbagai bentuk kemiskinan, baik kemiskinan kultural, maupun kemiskinan struktural. Kompleksitas masalah kemiskinan menurut Coombs. et. al (1985:10) disebabkan masyarakat yang tidak belajar. Selanjutnya Coombs. et. al (1985:14) menyebutkan hubungan antara belajar dengan kemiskinan : sebuah lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal (*The Vicious Circle of Poperty*), karena seseorang tidak belajar meningkatkan pengetahuan atau keterampilan akan berdampak pada produktivitasnya yang rendah, investasinya rendah miskin sikap perilaku dan miskin keterampilan. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*Community Welfare*), adalah dengan upaya-upaya nyata yang dapat merubah lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal (*The Vicious Circle of Poperty*), menjadi sebuah spiral kemakmuran. (*The Spiral of Prosperity*).

Sesuai dengan pendapat tersebut, salah satu upaya alternatif pemecahan masalah di atas, adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Sebab kehidupan dan penghidupan yang berazaskan nilai-nilai manusiawi, baik bagi diri maupun lingkungannya, secara individu maupun kelompok, mutlak memerlukan bekal kemampuan yang dibentuk melalui jalur pendidikan dan pembinaan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai dan sikap-sikap tertentu, yang pelaksanaannya dapat berlangsung di sekolah atau di luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah, sebagai subsistem pendidikan nasional, mempunyai peranan yang sangat strategis berperan aktif memecahkan berbagai permasalahan di atas. Kehadiran pendidikan luar sekolah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat banyak memberikan

manfaat. Djudju Sudjana (2000: 39) menjelaskan paling tidak ada tiga manfaat pendidikan luar sekolah, yaitu sebagai berikut : 1) segi biaya lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digunakan dalam pendidikan sekolah, 2) program pendidikan luar sekolah lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dan 3) pendidikan luar sekolah memiliki program yang fleksibel.

Upaya membelajarkan dan memberdayakan masyarakat tidak terlepas dari usaha-usaha yang harus dilakukan oleh lembaga, dinas, instansi, pemerintah maupun swasta. Dinas atau instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi, serta kewenangan berkaitan dengan berbagai permasalahan tersebut di atas. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh para pelaksana satuan program, sebagai agen perubahan dengan mem-perhatikan peningkatan kemampuan. Pember-dayaan Masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) PNPM yang dilaksanakan di desa Balonggandu kecamatan Jatisari kabupaten Karawang adalah salah satu satuan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan PNPM di Desa Balonggandu sudah berlangsung kurang lebih sekitar 4 tahun. Salah satu tujuan dari program tersebut adalah membimbing, mengembangkan, dan mengarahkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, para pengangguran agar memiliki keterampilan untuk berwirausaha. Sejak diselenggarakan mulai bulan Juli tahun 2015, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh pengurus PNPM desa Balonggandu terdapat 20 orang yang mulai merintis usaha kecil-kecilan yang sebagian besar adalah pedagang sedang mengikuti kegiatan pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) tersebut.

Pelatihan yang diselenggarakan pengurus PNPM berupa pembimbingan dan pembelajaran terhadap masyarakat dalam kegiatan pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM). Maksud dan tujuan pelatihan tersebut diantaranya untuk mengadakan perubahan perilaku masyarakat. Dengan bertambahnya keterampilan dan pengetahuan diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Ditinjau dalam konteks pendidikan, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) di Desa Balonggandu

merupakan proses pendidikan luar sekolah. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat dilihat dari taksonomi pendidikan luar sekolah yang dikemukakan Djudju Sudjana (2004 : 15) bahwa *salah satu klasifikasi program pendidikan luar sekolah adalah pendidikan kejuruan atau keterampilan yang berkaitan dengan latihan kerja, meliputi kegiatan belajar dalam rumpun kesehatan, pertanian, kerajinan dan industri, teknologi, kesenian, niaga, dan bahasa.*

Kutipan di atas menyimpulkan bahwa pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan latihan kerja merupakan wadah pembinaan dan pengembangan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha/industri. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum dilakukannya evaluasi program pendidikan kewirausahaan masyarakat tersebut secara konsisten dan kontinui. Bertitik tolak dari kondisi yang telah dikemukakan di atas memberikan pemikiran bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) PNPM di desa Balongandu kecamatan Jatisari kabupaten Karawang".

KAJIAN LITERATUR

1. Konsep Evaluasi Program

Evaluasi pada umumnya, dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu program kegiatan atau proyek. Informasi ini biasanya berguna untuk pengambilan keputusan, seperti penyempurnaan lebih lanjut dari suatu kegiatan, atau penghentian suatu kegiatan proyek, atau penyebarluasan suatu gagasan yang mendasari suatu kegiatan yang sedang diuji-cobakan.

Suharsimi Arikunto (2002: 13) mendefinisikan evaluasi dengan lebih dahulu menjelaskan tentang mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk dan bersifat kualitatif. Sedangkan mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas, yaitu mengukur dan menilai. Dengan demikian evaluasi adalah menilai (tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu).

Evaluasi menurut rumusan Daniel Stufflebean : adalah sebagai suatu proses dimana

kita mengupayakan sejumlah informasi yang berkaitan dengan jenis keputusan yang akan diambil, mengumpulkan dan melengkapi informasi yang berguna dan diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jadi evaluasi : adalah proses dengan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan atau bertahap dimana digunakan berbagai pendekatan metoda dan teknik.

Program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tersebut tampak adanya tiga unsur dalam program, yaitu direncanakan, bertujuan, dan pencapaian tujuan dapat diukur dengan cara/alat tertentu. Program dapat diartikan secara sempit dalam arti hanya mencakup satu jenis kegiatan belajar, misalnya Program Kejar Paket A di suatu desa, Program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan di SKB suatu Kabupaten, dan sebagainya.

Dalam arti luas program berarti keseluruhan kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu instansi seperti Program Pendidikan Luar Sekolah, Program Panca Usaha Tani. Macam-macam wujud program dapat ditinjau dari berbagai segi :

- a. Ditinjau dari segi tujuan : bertujuan mencari keuntungan, bertujuan sosial, dsb.
- b. Ditinjau dari jenisnya : program pertanian, program kesehatan, program pendidikan; diklasifikasikan atas isi kegiatan program.
- c. Ditinjau dari jangka waktu : program jangka pendek : kurang dari satu tahun program jangka menengah : 1 - 5 tahun program jangka panjang 5 tahun atau lebih
- d. Ditinjau dari keluasannya : program yang sempit, program yang luas.
- e. Ditinjau dari pelaksana : program kecil = pelaksana beberapa orang, program besar = pelaksana banyak.
- f. Ditinjau dari sifatnya program penting : menyangkut kepentingan yang besar program, kurang penting : menyangkut kepentingan yang terbatas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : "*Penilaian adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data (informasi) yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan*". Tiga unsur penting yang terkandung dalam definisi ini adalah - kegiatan sistematis - data atau informasi - pengambilan keputusan.

Beberapa unsur kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses evaluasi :

- (1) Mengumpulkan keterangan mengenai kemungkinan-kemungkinan keputusan yang hendak diambil terhadap permasalahan
- (2) Berdasar hasil pengumpulan keterangan, kemudian mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu kegiatan.
- (3) Hasil pengumpulan data dan informasi, kemudian kegiatan pengolahan data untuk disajikan kepada pengambil keputusan.
- (4) Penetapan keputusan dengan memilih salah satu alternatif tindakan yang terbaik.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dewasa ini banyak upaya diselenggarakan untuk mendorong, membangkitkan kesadaran, memberikan kekuatan dan kewenangan kepada masyarakat, agar mereka mampu berbuat banyak dalam mengikuti perkembangan sosial, ekonomi dan politik pada jamannya. Upaya tersebut dikenal dengan istilah pemberdayaan atau *empowering*. Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) memaparkan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007 : 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini :

“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. *Kedua*, partisipasi masyarakat juga membantu upaya

identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”.

Melalui proses pemberdayaan, maka diasumsikan seseorang dari strata sosial terendah sekalipun bisa saja terangkat dan muncul menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah ke atas (Sarman, Kornpas 7 September 1996). Sasaran yang perlu diberdayakan adalah masyarakat yang strata sosialnya rendah. Seperti yang dikatakan oleh Prijono dan Pranaka (1996:67), bahwa "rakyat yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, nelayan, orang miskin, di kota dan desa, kelompok masyarakat dalam kondisi yang mereka belum mampu memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya".

Menurut Moejiarto yang dikemukakan oleh Prijono dan Pranaka (1996:83) mengemukakan bahwa “konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Memberdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dari eksploitasi atas yang lemah.

Artinya memberdayakan masyarakat adalah "upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Konsep pemberdayaan masyarakat ini menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta ketrampilan manajemen. Kunci perubahan struktur masyarakat dilakukan dengan pengembangan kelembagaan dan pengembangan individu (personil) dengan mengembangkan tingkat usaha ekonomi, tingkat swadaya masyarakat dan nilai-nilai fisik.

3. Konsep Kewirausahaan

Meskipun sampai sekarang ini belum ada terminologi yang persis sama tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*), akan tetapi pada umumnya memiliki hakikat yang hampir sama

yaitu merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh (Peter F. Drucker, 1994). Menurut Hisrich et al (2004 : 6) menjelaskan bahwa :

Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi.

Menurut Drucker (1994 : 27) dikemukakan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*). Bahkan, "*entrepreneurship*" secara sederhana sering juga diartikan sebagai prinsip atau kemampuan wirausaha (Ibnu Soedjono, 1993; Meredith, 1996; Marzuki Usman, 1997).

Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan "*entrepreneurship*", yang dapat diartikan sebagai "*the back bone of economy*", yaitu syaraf pusat perekonomian atau sebagai "*tail bone of economy*", yaitu pengendali perekonomian suatu bangsa (Soeharto Wirakusumo, 1997 : 1). Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) atau suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru (*creative*) dan sesuatu yang berbeda (*innovative*). Menurut Thomas W. Zimmerer (1996 : 51), kewirausahaan adalah "*applying creativity and innovation to solve the problems and to exploit opportunities that people face everyday*".

Dari pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah suatu kemampuan (*ability*) dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup.

David McClelland (1961 : 205) dalam Suryana (2001 : 26) mengemukakan bahwa ditinjau dari sudut pandang perilaku, seorang yang memiliki sikap dan perilaku kewirausahaan memiliki enam ciri perilaku sebagai berikut :

- 1) Keterampilan mengambil keputusan dan mengambil resiko yang moderat, dan bukan atas dasar kebutuhan belaka.
- 2) Bersifat energetik, khususnya dalam bentuk berbagai kegiatan inovatif.
- 3) Tanggung jawab individual.
- 4) Mengetahui hasil-hasil dari berbagai keputusan yang diambilnya, dengan tolok ukur satuan uang sebagai indikator keberhasilan.
- 5) Mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa datang.
- 6) Memiliki kemampuan berorganisasi, yaitu seseorang wirausaha memiliki kemampuan keterampilan, kepemimpinan, dan manajerial.

Beberapa konsep "*entrepreneur*" di atas lebih menekankan pada kemampuan dan perilaku seseorang sebagai pengusaha. Bahkan Dun Steinhoff dan John F. Burgess (1991), memandang kewirausahaan sebagai pengelola perusahaan kecil atau pelaksana perusahaan kecil. Menurutnya, "*entrepreneur*" is considered to have the same meaning as "*small business owner-manager*" or "*small business operator*".

Menurut Meredith (1996 : 9), "berwirausaha berarti memadukan perwatakan pribadi, keuangan, dan sumber daya". Oleh karena itu, berwirausaha merupakan sebuah pekerjaan atau karier yang harus bersifat fleksibel, dan imajinatif, mampu merencanakan, mengambil risiko, mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Syarat berwirausaha harus memiliki kemampuan untuk menemukan dan mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang-peluang itu. Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Zimmerer (1996 : 51), nilai tambah tersebut diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut :

- (1) pengembangan teknologi baru (*developing new technology*),
- (2) Penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*),
- (3) Perbaikan produk dan jasa yang sudah ada (*improving existing products or services*)
- (4)

Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (*finding*

different ways of providing more goods and services with fewer resources).

Meskipun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada peran pengusaha kecil, akan tetapi sifat ini dimiliki juga oleh bukan pengusaha. Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang memiliki perilaku inovatif dan kreatif dan pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan, dan tantangan. Misalnya birokrat, mahasiswa, dosen, dan masyarakat lainnya.

Kewirausahaan berkembang dan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi ini dipicu oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosiologi. Faktor individu yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian *locus of control*, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, dan ketidakpuasan. Sedangkan faktor-pemicu yang berasal dari lingkungan ialah peluang, model peran, aktivitas, pesaing, inkubator, sumber daya, dan kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan, faktor pemicu yang berasal dari lingkungan sosial meliputi asal keluarga, orangtua dan jaringan kelompok yang sangat menentukan kewirausahaan.

4. Konsep Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat

Berdasarkan buku panduan teknis Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan anak usia dini, PNFI. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2012 memberikan pengertian Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) adalah program pelayanan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan usaha yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan satuan PNF lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Tujuan penyelenggaraan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) ini adalah:

1. Menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik.
2. Memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan kepada peserta didik.
3. Memberi bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik.
4. Melatih keterampilan berwirausaha kepada peserta didik melalui praktik berwirausaha.
5. Mendorong dan menciptakan wirausahawan baru melalui kursus dan pelatihan yang didukung oleh dunia usaha dan industri,

mitra-mitra usaha dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja/usaha baru atau mengakses peluang kerja/usaha yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang paling tepat adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif ini pada dasarnya adalah pendekatan yang digunakan untuk mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Pendekatan kualitatif ini dianggap sesuai digunakan dalam penelitian ini dengan alasan sebagai berikut : 1) lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, 2) menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2000 : 5).

Dalam penelitian ini subyek yang akan diteliti terdiri dari dua bagian, pertama, sebagai "sumber informasi", yaitu responden yang terdiri dari anggota kelompok masyarakat produktif sebagai peserta didik/pelatihan yang dapat memberikan data tentang dirinya serta bagaimana pengalamannya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) di Balonggandu. Kedua, "sumber informan", yaitu sumber data lain yang dapat memberikan informasi pelengkap tentang hal-hal yang tidak terungkap dari subyek penelitian, dan sekaligus sebagai triangulasi untuk menjamin akurasi data. Informan ini terdiri dari penyelenggara dan sumber belajar program pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)

Pemberdayaan atau *empowering*, menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) memaparkan bahwa: *Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam*

mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Melalui Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh UPK Jatisari mandiri sebagai wadah Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut bersama masyarakat. Dalam melaksanakan setiap program, perencanaan senantiasa dilakukan sebagai bagian dari suatu program yang akan diselenggarakan. Perencanaan ini menyangkut bagaimana suatu program harus dan akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi dengan ketua UPK Jatisari Mandiri dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat di Desa Balonggandu senantiasa menyusun perencanaan terlebih dahulu, adapun yang termasuk dalam kegiatan perencanaan ini yaitu :

a. Jenis Kegiatan/keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengungkapkan untuk kriteria kegiatan PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat yaitu :

- 1) Lebih bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM),
- 2) Berdampak langsung pada kesejahteraan,
- 3) Berpotensi untuk berkembang dan berkelanjutan,
- 4) Didukung SDM yang ada,
- 5) Bisa dikerjakan oleh masyarakat.

Maka disepakatilah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah keterampilan menjahit tas sekolah sebagai kegiatan pelatihan dan kegiatan pendukung pendidikan kewirausahaan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup anggota PNPM Mandiri di Desa Balonggandu.

b. Persiapan Administrasi PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat.

Persiapan administrasi PNPM mandiri berbasis keswadayaan ini dalam penyelenggaraan keterampilan menjahit membuat tas sekolah yaitu penyusunan rencana kerja dan pembagian tugas, penyusunan jadwal pelatihan dan penentuan fasilitator.

c. Rekrutmen Peserta/ Anggota

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ketua UPK Jatisari Mandiri / PNPM Mandiri diperoleh data bahwa rekrutmen pelatihan menjahit dalam pendidikan kewirausahaan masyarakat bagi ketua kelompok atau anggota kelompok bagi yang berminat untuk menjahit tas sekolah, setelah dilatih barulah difasilitasi setiap kelompoknya untuk memproduksi sendiri atau bersama kelompok. Pelatihan menjahit membuat tas sekolah direkrut berdasarkan pada kriteria selanjutnya sebagai berikut :

- 1) Mereka adalah anggota kelompok PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Jatisari
- 2) Mereka yang bisa menyempatkan waktunya disela-sela kesibukan menjadi ibu rumah tangga
- 3) Memiliki minat dalam keterampilan menjahit

Jumlah anggota peserta pelatihan kebanyakan terdiri dari ketua kelompok PNPM Mandiri sebanyak 20 orang, yang berlatar pendidikan SD hingga SMA.

d. Penyusunan Anggaran

Pendanaan anggaran modal yang awalnya memanfaatkan modal dari pelatihan kapasitas menjahit sebelumnya dengan bantuan dana dari pusat sebesar 60 juta. Sekarang sisa anggaran tersebut dialokasikan atau dimanfaatkan untuk pengayaan 6 mesin jahit listrik yang sekarang difungsikan sebagai alat pembuatan tas sekolah serta bahan-bahan mentah lain. Modal selanjutnya berdasarkan penggolongan dana simpan pinjam yang di ikuti oleh anggota PNPM mandiri di Desa Balonggandu.

e. Tujuan PNPM Mandiri Melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) dalam meningkatkan Keterampilan Nonfisik kelompok masyarakat

Dari hasil wawancara terhadap R1 bahwa tujuan diselenggarakannya keterampilan nonfisik yaitu menjahit tas sekolah ini dalam rangka meningkatkan pendapatan anggota PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan

masyarakat dengan pelatihan menjahit di Desa Balonggandu ini diharapkan mampu :

- 1) Memberdayakan kelompok simpan pinjam, sehingga perempuan mendapatkan penghasilan tambahan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan dan perekonomian masyarakat miskin.

f. Program Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana tertulis serta pedoman untuk mengatur proses pembelajaran atau pelatihan dalam pencapaian tujuannya. Dari hasil wawancara terhadap R1 bahwa kurikulum sepenuhnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama antar tim pengelola dengan para pelatih atau fasilitator yang berkompeten dibidang pelatihan. Di bawah ini disampaikan tabel kurikulum pelatihan menjahit tas sekolah di UPK Jatisari Mandiri dalam peranan PNPM Mandiri melalui kegiatan pendidikan kewirausahaan masyarakat pada kelompok masyarakat di Desa Balonggandu.

2. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)

Wawasan anggota sudah lebih luas mengenai bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak dan benar , pengetahuan yang dimiliki pun tentunya bertambah lebih banyak, keterampilan dan sikap yang telah dimiliki anggota diantaranya adalah sikap ingin maju dan mandiri dengan memiliki keahlian membuat tas dan keterampilan memasak. Para anggota PNPM Mandiri mengikuti program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) ini telah mengalami banyak perubahan, dari berbagai keahlian yang telah diberikan ilmu dan teorinya kepada mereka. Keahlian membuat tas yang memang sekarang telah menjadi program UPK dalam meningkatkan pendapatan para anggota melalui program PKM. Wawasan, pengetahuan , keterampilan yang diberikan tidak jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan penambahan dan pengembangan keahlian diantaranya adalah wawasan tentang kewirausahaan, kemandirian atau kesawadayaan, pengetahuan mengenai bagaimana teori mengelola keuangan

yang baik dan bijak, latihan menjahit dan memberikan arahan bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam bekerja sama.

Memilih produk yang mudah untuk dikuasai oleh anggota kelompok PNPM Mandiri menjadi kriteria pemilihan produk. Menjahit adalah keterampilan yang sering dilakukan oleh kaum wanita. Cara pemasaran produk barang hasil dari keterampilan anggota PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat kelompok masyarakat di Desa Balonggandu ini dengan cara pemasarannya melalui pemesan produk PNPM, di order dengan cara online di internet dan pemesanan di industri dan sekolah. Dengan banyak cara pemasarannya di harapkan bisa meningkatkan pesanan dan produktivitas keterampilan contohnya pembuatan tas sekolah dan sabuk. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan produk dengan cara didaftarkan ke Disperindag dan pemasaran melalui instansi di Kabupaten Karawang. Adapun hasil yang didapatkan para anggota PNPM Mandiri di Desa Balonggandu melalui program pendidikan kewirausahaan masyarakat kelompok masyarakatnya adalah dengan indikator kewirausahaannya kelompok masyarakat diharapkan memiliki rasa kepercayaan diri , berorientasi pada tugas dan hasil , siap mengambil resiko dan kosekuensi yang dihadapi nantinya, dapat menjadi seorang pemimpin, original, dan tentunya memandang pada masa depan yang dapat membaca peluang-peluang. Hasil sikap wirausaha yang diperoleh dari kegiatan PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat di Desa Balonggandu melalui pelatihan sebagai berikut sesuai dengan Geoffrey G. Meredith (1996:5-6) yang mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan :

- a. Percaya Diri
- b. Berorientasi pada Tugas dan Hasil
- c. Pengambilan Resiko
- d. Kepemimpinan
- e. Keorisinilan
- f. Berorientasi Ke Masa Depan

Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) di Desa Balonggandu secara umum cukup matang dalam hal perencanaan dengan pemilihan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan kelompok masyarakat. Perencanaan sesuai dengan standar perencanaan pelatihan ditujukan dengan adanya pendampingan yang dilakukan

oleh fasilitator atau pelatih, ditunjang dengan kurikulum pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok mas-yarakat.

Pada tahap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan di Desa Balonggandu terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya kekurangan nara sumber teknis, misalnya dalam produksi pembuatan tas. Secara umum pelaksanaannya dapat menunjang keberhasilan kegiatan PNPM Mandiri melalui PKM dalam mengembangkan kewirausahaan terbukti dengan keseriusan UPK Jatisari Mandiri dalam merekrut pelatih yang memiliki kompetensi dasar pelatih yang baik. Wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap wirausahaan diberikan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat

Merujuk pada hasil PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat di Desa Balonggandu cukup berhasil dalam a.Mengembangkan kewirausahaan b.Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat, serta wawasan dan pengetahuan anggota sudah lebih luas mengenai bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak dan benar, pengetahuan yang dimiliki pun tentunya bertambah lebih banyak, keterampilan dan sikap wirausaha ini dapat menjadi bukti program pendidikan kewirausahaan masyarakat ini mampu menggerakkan pengembangan masyarakat.

KESIMPULAN

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) di Desa Balonggandu secara umum merujuk pada hasil PNPM Mandiri melalui pendidikan kewirausahaan masyarakat di Desa Balonggandu cukup berhasil dalam mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Modekkhan. (2007). *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang : Averroes Press.
- Ali, M. (1993). *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi aksara.
- Aziz, Moh, Ali Dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yoyakarta : PT. LkiS Pelangi Nusantara.

- Bogdan, R. dan Taylor, S. J. (1993). *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Drucker, P. F. (1994). *Inovation dan Entrepreneurship, Practice and Principles*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama Erlangga.
- Gagne, M. R. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Intruction*. Florida: Florida State University.
- Hisrich et al. (2004). *Entrepreneurship, 7th edition*. NY: McGraw – Hill Irwin
- Kartono, K. (1989). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.
- Meredith. G. Geoffrey (1996). *Kewirausahaan : Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Binawan Prasinido.
- Moleong Lexi J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1992). *Metode Research*. Bandung: Jemmars.
- Sudjana, Djudju. (2004). *Pendidikan Nonformal (wawasan, sejarah perkembangan filsafat, teori pendukung, azas)*. Bandung: Falah Production.
- (2000). *Pendidikan Luar Sekolah (Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas)*. Bandung: Falah Production.
- Prijono, Onny dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Zimmener, W. Thomas, Norman M. Scarborough. (1996). *Entrepreneurship and The New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.